

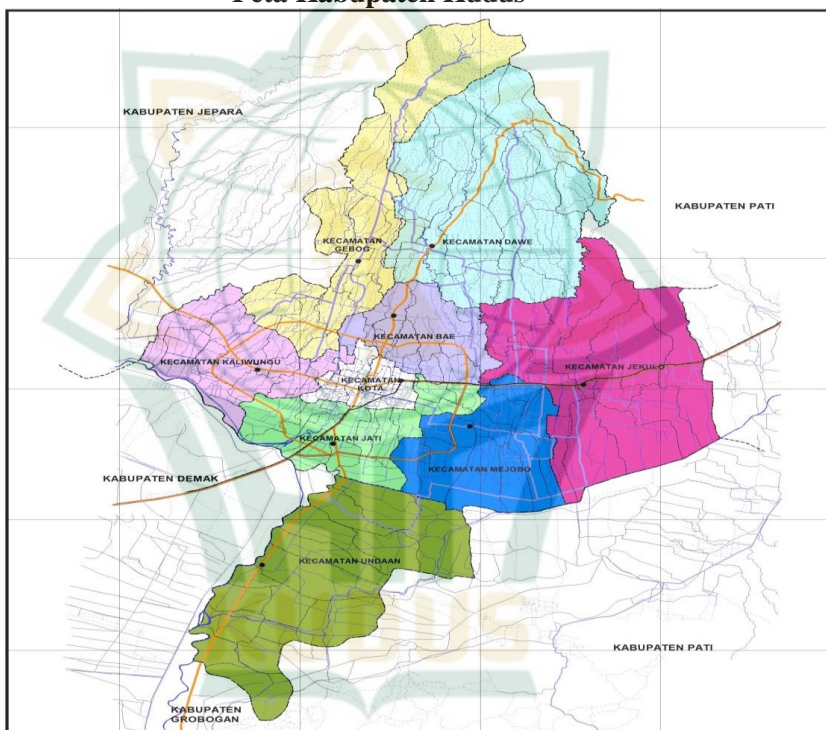
## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Kudus. Berikut peta objek penelitian berdasarkan badan statistik kabupaten kudus :

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Kudus**



*Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka 2021*

#### a. Kondisi Wilayah

Kabupaten Kudus adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan empat Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan dan Pati sebelah selatan, dan Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat. Kabupaten Kudus terletak di antara  $110^{\circ}36'$  dan  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur dan antara  $6^{\circ}51'$  dan  $7^{\circ}16'$  Lintang Selatan. Jarak

terjauh dari barat ke timur yakni 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Kabupaten Kudus terdiri dari sembilan Kecamatan yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe.<sup>1</sup>

b. Kependudukan

Data kependudukan adalah data pokok yang dibutuhkan oleh kalangan pemerintah ataupun swasta sebagai bahan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan di bidang sosial, ekonomi ataupun politik memerlukan data kependudukan karena penduduk yakni subjek sekaligus objek dari pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2020 adalah 849.184 jiwa yang terdiri dari 423.777 jiwa laki-laki (49,90 persen) dan 425.407 jiwa perempuan (50,10 persen). Kecamatan Jati memiliki persentase penduduk terbesar, yaitu 13,13 persen dari penduduk Kabupaten Kudus. Kecamatan Bae memiliki persentase penduduk terkecil, yaitu 8,70 persen dari penduduk Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2020, sex ratio penduduk Kabupaten Kudus yakni 99,62. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Akan tetapi, sex ratio tersebut bervariasi di setiap kecamatan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus adalah 1.997 jiwa setiap satu kilometer persegi. Kecamatan terpadat adalah Kecamatan Kota Kudus sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Dawe.<sup>2</sup>

c. Sejarah Singkat Kabupaten Kudus

Sejarah Kabupaten Kudus yaitu suatu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kota Kudus menjadi pusat untuk perkembangan agama Islam pada abad pertengahan, Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelas dan salah satu kota di Pulau Muria. Pada zaman dahulu Kota Kudus bernama Kota Tajug, disebut Tajug karena di desa tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug adalah bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai untuk tujuan keramat, Tajug dahulunya dijadikan tempat bersembahyang masyarakat yang beragama Hindu di daerah tersebut. Kemudian Sunan Kudus (Syekh Ja'far

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2021* (Kudus: Geographics Kudus, 2021).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

Shodiq) mendekati masyarakat kota Tajug dengan membuat struktur atas Menara Kudus yang berbentuk Tajug.<sup>3</sup>

Masyarakat tajug hidup dari berdagang, bertani, membuat batu bata, dan menangkap ikan. Setelah kedatangan Sunan Kudus, Kota itu dikenal sebagai "Al-Quds" yang berarti "Kudus". Masyarakat Tajug juga terinspirasi dari filosofi yang digunakan Sunan Kudus, Gusjigang. Gus berarti bagus, ji berarti mengaji, dan gang berarti berdagang. Melalui filosofi tersebut, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat "gusjigang" itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang suatu usaha yaitu dua diantaranya usaha batik dan jenang.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Deskripsi Responden

Perolehan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan datanya yakni dengan membagikan kuesioner kepada partisipan, yang kemudian harus melengkapi pernyataan. Responden dalam penelitian yang dipilih untuk mengisi kuesioner yaitu kepala desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. Data yang didapatkan pada penelitian disatukan secara langsung oleh peneliti, hal tersebut dilakukan agar efektif untuk mendapatkan tingkat respon yang baik dari responden. Menjadi syarat pemuasan, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 60 responden.

Oleh karena itu peneliti mengelompokkan karakteristik responden menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut :

#### a. Jenis Kelamin

Kriteria berdasarkan jenis kelamin responden bisa dilihat pada tabel 4.1 yaitu :

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	56	93 %
Perempuan	4	7 %
Total	60	100 %

<sup>3</sup> Putradi Pamungkas, "Kabupaten Kudus - Tribunnewswiki.Com," 2020, accessed June 24, 2022, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/06/kabupaten-kudus>.

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dijelaskan bahwa dari 60 responden, sebanyak 56 laki-laki dengan presentase 93% dan 4 responden yaitu perempuan dengan presentase 7%.

b. Umur

Kriteria berdasarkan jenis kelamin responden bisa dilihat dalam tabel 4.2 yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Umur Responden**

Umur	Jumlah	Presentase
21-30	1	2 %
31-40	14	23 %
41-50	29	48 %
51-60	16	27 %
Total	60	100 %

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 29 dengan presentase 48%, responden yang berusia 51-60 tahun sebanyak 16 dengan presentase 27%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 14 dengan presentase 23%, dan responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 1 dengan presentase 2%.. Maka bisa diartikan bahwa responden yang paling banyak yaitu berusia 41-50 tahun.

c. Pendidikan

Kriteria berdasar jenis kelamin responden bisa dilihat pada tabel 4.3 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Pendidikan Responden**

Pendidikan	Jumlah	Presentase
S2	1	2%
S1	6	10 %
D3	3	5 %
SLTA	50	83 %
Total	60	100 %

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden pendidikan SLTA sebanyak 50 dengan presentase 83%, responden yang pendidikan S1 sebanyak 6 dengan presentase 10%, responden pendidikan D3 sebanyak 3 dengan presentase 5%, dan responden yang pendidikan S2 sebanyak 1 dengan presentase 2%.

## Deskripsi Angket

## a. Partisipasi Masyarakat

Pada variabel partisipasi masyarakat terdiri dari enam pernyataan, dari hasil item tersebut jadi dapat dideskripsikan dalam tabel dibawah :

**Tabel 4.4**  
**Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat**

Item Pernyataan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
X1.1	0	0%	0	0%	12	20%	48	80%
X1.2	0	0%	0	0%	21	35%	39	65%
X1.3	0	0%	1	2%	18	30%	41	68%
X1.4	0	0%	1	2%	34	57%	25	41%
X1.5	1	2%	0	0%	21	35%	38	63%
X1.6	0	0%	0	0%	12	20%	48	80%

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

1. Dari data tabel 4.4 diatas menyatakan bahwasannya variabel partisipasi masyarakat item X1.1 menyatakan 20% responden menyatakan setuju, dan 80% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.
2. Item X1.2 menyatakan bahwa 35% responden menyatakan setuju, dan 65% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat aktif dalam pelaksanaan musyawarah desa.
3. Item X1.3 menyatakan bahwasannya 2% responden menyatakan tidak setuju, 30% responden menyatakan setuju, dan 68% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 98% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan ide terhadap program yang diharapkan.
4. Item X1.4 menyatakan bahwasannya 2% responden menyatakan tidak setuju, 57% responden menyatakan setuju, dan 41% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 98% responden menyatakan setuju bahwa ide yang disampaikan masyarakat diterima oleh pemerintah desa.
5. Item X1.5 menyatakan bahwasannya 2% responden menyatakan sangat tidak setuju, 35% menyatakan setuju, 63% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 98% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat yang

memiliki keterampilan bersedia membantu jika diminta oleh pemerintah desa.

6. Item X1.6 menyatakan bahwasannya 20% responden menyatakan setuju, dan 80% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat ikut mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasar pemaparan hasil data diatas, jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata 99% responden atau pemerintah desa menyatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

#### b. Transparansi

Pada variabel transparansi terdiri dari empat pernyataan, dari hasil item tersebut jadi bisa dideskripsikan dalam tabel dibawah :

**Tabel 4.5**  
**Frekuensi Variabel Transparansi**

Item Pernyataan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
X2.1	0	0%	0	0%	14	23%	46	77%
X2.2	0	0%	0	0%	23	38%	37	62%
X2.3	0	0%	0	0%	34	57%	26	43%
X2.4	0	0%	0	0%	20	33%	40	67%

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

1. Dari data tabel 4.5 diatas menyatakan bahwasannya variabel transparansi item X2.1 menyatakan 23% responden menyatakan setuju, dan 77% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa APBDesa diumumkan pada tempat publik.
2. Item X2.2 menyatakan bahwasannya 38% responden menyatakan setuju, dan 62% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa pemerintah menyediakan fasilitas informasi kepada publik.
3. Item X2.3 menyatakan bahwasannya 57% responden menyatakan setuju, dan 43% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa APBDesa dapat diakses melalui seluruh kanal informasi pemerintah desa.
4. Item X2.4 menyatakan bahwasannya 33% responden menyatakan setuju, dan 67% responden menyatakan sangat

setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa realisasi APBDesa dipublikasikan secara periodik.

Berdasarkan pemaparan hasil data diatas, jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata 100% responden atau pemerintah desa memberi akses informasi APBDesa kepada masyarakat.

c. Akuntabilitas Publik

Pada variabel akuntabilitas publik terdiri dari empat pernyataan, dari hasil item tersebut jadi bisa dideskripsikan dalam tabel dibawah :

**Tabel 4.6**  
**Frekuensi Variabel Akuntabilitas Publik**

Item Pernyataan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
X3.1	0	0%	0	0%	10	17%	50	83%
X3.2	0	0%	0	0%	24	40%	36	60%
X3.3	0	0%	0	0%	30	50%	30	50%
X3.4	0	0%	0	0%	23	38%	37	62%

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

1. Dari data tabel 4.6 diatas menyatakan bahwasannya variabel akuntabilitas publik item X3.1 menyatakan 17% responden menyatakan setuju, dan 83% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa pemerintah desa selalu melakukan evaluasi kerja terhadap kegiatan yang ada di dalam APBDesa.
2. Item X3.2 menyatakan bahwasannya 40% responden menyatakan setuju, dan 60% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa adanya SOP di dalam pengelolaan APBDesa.
3. Item X3.3 menyatakan bahwasannya 50% responden menyatakan setuju, dan 50% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa kegiatan dalam APBDesa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Item X3.4 menyatakan bahwasannya 38% responden menyatakan setuju, dan 62% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pemaparan hasil data diatas, jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata 100% responden atau pemerintah

desa bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di dalam APBDesa.

d. Kualitas APBD

Pada variabel kualitas APBDesa terdiri dari tujuh pernyataan, dari hasil item tersebut maka bisa dideskripsikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Frekuensi Variabel Kualitas APBDesa**

Item Pernyataan	Total STS	%	Total TS	%	Total S	%	Total SS	%
Y.1	0	0%	0	0%	20	33%	40	67%
Y.2	0	0%	12	20%	23	38%	25	42%
Y.3	0	0%	2	3%	19	32%	39	65%
Y.4	0	0%	0	0%	25	42%	35	58%
Y.5	0	0%	0	0%	19	32%	41	68%
Y.6	0	0%	0	0%	16	27%	44	73%
Y.7	0	0%	0	0%	23	38%	37	62%

*Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022*

1. Dari data tabel 4.7 diatas menyatakan bahwasannya variabel kualitas APBDesa item Y.1 menyatakan 33% responden menyatakan setuju, dan 67% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa APBDesa mempertimbangkan pencapaian tujuan prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Item Y.2 menyatakan bahwasannya 20% responden menyatakan tidak setuju, 38% responden menyatakan setuju, dan 42% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 80% responden menyatakan setuju bahwa APBDesa mempertimbangkan pencapaian tujuan dengan biaya yang murah.
3. Item Y.3 menyatakan bahwasannya 3% responden menyatakan tidak setuju, 32% responden menyatakan setuju, dan 65% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 97% responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
4. Item Y.4 menyatakan bahwasannya 42% responden menyatakan setuju, dan 58% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa hasil dan manfaat kegiatan pada APBDesa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



5. Item Y.5 menyatakan bahwasannya 32% responden menyatakan setuju, dan 68% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa realisasi APBDesa disampaikan kepada masyarakat secara transparan.
6. Item Y.6 menyatakan bahwasannya 27% responden menyatakan setuju, dan 73% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa program yang dianggarkan dalam APBDesa untuk menunjang kemajuan desa.
7. Item Y.7 menyatakan bahwasannya 38% responden menyatakan setuju, dan 62% responden menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan 100% responden menyatakan setuju bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasar pemaparan hasil data diatas, jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata 97% responden atau pemerintah desa telah melaksanakan program kerja yang disepakati masyarakat dan sudah direncanakan dalam APBDesa.

### C. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk suatu ukuran yang dilakukan untuk menunjukkan kevalidan suatu instrument penelitian.<sup>4</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan kepada responden, diperoleh (df=60-2) yakni (df=58 dengan signifikansinya 0,05) dengan perolehan r tabel sebesar (0,254). Jika r hitung > r tabel maka dapat dinyatakan valid dan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Hasil analisis validitas tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah, yaitu :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Item	Corrected Item Total Correlation (R hitung)	R tabel	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	X1.1	0,635	0,254	Valid
	X1.2	0,599	0,254	Valid
	X1.3	0,664	0,254	Valid
	X1.4	0,467	0,254	Valid

<sup>4</sup> Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*.

	X1.5	0,620	0,254	Valid
	X1.6	0,562	0,254	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,812	0,254	Valid
	X2.2	0,741	0,254	Valid
	X2.3	0,610	0,254	Valid
	X2.4	0,726	0,254	Valid
Akuntabilitas Publik (X3)	X3.1	0,734	0,254	Valid
	X3.2	0,724	0,254	Valid
	X3.3	0,741	0,254	Valid
	X3.4	0,766	0,254	Valid
Kualitas APBDesa (Y)	Y.1	0,803	0,254	Valid
	Y.2	0,704	0,254	Valid
	Y.3	0,584	0,254	Valid
	Y.4	0,722	0,254	Valid
	Y.5	0,457	0,254	Valid
	Y.6	0,730	0,254	Valid
	Y.7	0,824	0,254	Valid

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Pada tabel 4.8 diatas, maka bisa disimpulkan bahwasannya pernyataan dinyatakan valid apabila masing-masing item  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu suatu pengujian yang menggunakan alat ukur untuk mengukur sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya.<sup>5</sup> Dalam uji reliabilitas pengambilan keputusan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, dengan dua kriteria yaitu jika nilai *Cronbach's alpha* tersebut  $>$  0,60 maka dapat dinyatakan bahwa pernyataan pada variabel tersebut reliabel dan sebaliknya jika nilai *Cronbach's alpha*  $<$  0,60 maka pernyataan pada variabel dinyatakan tidak reliabel.

Berdasarkan penelltian, diperoleh hasil analisis reliabilitas bisa dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Reliability Coeffisien	Cronbach's Alpha	Alpha	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X1)	6 item	0,616	0,60	Reliabel

<sup>5</sup> Riyanto and Hatmawan.

Transparansi (X2)	4 item	0,685	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Publik (X3)	4 item	0,720	0,60	Reliabel
Kualitas APBDesa (Y)	7 item	0,803	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Berdasar tabel 4.9 diatas mendapatkan hasil yakni setiap variabel partisipasi masyarakat (X1) mempunyai *Cronbach's alpha* sebesar 0,616, variabel transparansi (X2) mempunyai *Cronbach's alpha* sebesar 0,685, variabel akuntabilitas publik (X3) mempunyai *Cronbach's alpha* sebesar 0,720, dan variabel kualitas APBDesa (Y) mempunyai *Cronbach's alpha* sebesar 0,803. Jadi setiap variabel mempunyai nilai *Cronbach's alpha* >0,60 yang berarti semua variabel (X1, X2, X3, dan Y) dinyatakan reliabel.

**D. Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dan variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametik Kolmogorov – Smirnov (K-S)<sup>6</sup>, pengambilan keputusan dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) yang didapat dari hasil pengujian normalitas dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yakni sebesar 0,05. Data bisa dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05, tetapi jika nilai Asymp Sig (2-tailed) < 0,05 data tidak terdistribusi secara normal. Hasil analisis uji normalitas bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58043619
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094

<sup>6</sup> Riyanto and Hatmawan.

	Negative	-.086
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

- Test distribution is Normal
- Calculated from data
- Lilliefors Significance Correction
- This is a lower bound of the true significance

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, bisa disimpulkan bahwa uji statistik non-parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) diketahui nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$ . Jadi bisa disimpulkan bahwasannya nilai residual berdistribusi secara normal.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*).<sup>7</sup> Adanya multikolonieritas jika nilai VIF yang dihasilkan  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil analisis uji multikolonieritas bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	( Constant)	.490	2.817				
Partisipasi Masyarakat	.426	.172	.288	2.472	.016	.508	1.967
Transparansi	.654	.240	.349	2.723	.009	.418	2.391
Akuntabilitas Publik	.467	.217	.254	2.158	.035	.497	2.010

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Berdasar hasil pada tabel 4.11 diatas, bisa disimpulkan bahwasannya variabel partisipasi masyarakat, transparansi, dan

<sup>7</sup> Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika.*

akuntabilitas publik mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,50, 0,418, dan 0,497 dengan VIF sebesar 1,967, 2,391, dan 2,010. Dengan demikian dinyatakan bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas < 0,1 dan nilai VIF variabel bebas > 10, maka dinyatakan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.<sup>8</sup> Model yang baik merupakan model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya > 0,05. Sebaliknya jika terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya < 0,05.

Hasil analisis uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
( Constant)	1.536	1.620		.948	.347
Partisipasi Masyarakat	-.142	.099	-.260	-1.435	.157
Transparansi	.259	.138	.375	1.878	.066
Akuntabilitas Publik	.063	.124	-.093	.507	.614

a. Dependent Variable:RES2

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan, diketahui nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat (X1) yaitu 0,157, variabel transparansi (X2) yaitu 0,066, variabel akuntabilitas publik (X3) yaitu 0,614. Jadi semua variabel mempunyai nilai signifikansinya > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

<sup>8</sup> Ce Gunawan.

## E. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik terhadap kualitas APBDesa.<sup>9</sup> Berdasar hasil perhitungan yang didapat dengan menggunakan SPSS, pada tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**  
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
( Constant)	.490	2.817		.174	.863
Partisipasi Masyarakat	.426	.172	.288	2.472	.016
Transparansi	.654	.240	.349	2.723	.009
Akuntabilitas Publik	.467	.217	.254	2.158	.035

a. Dependent Variable: Kualitas APBDesa

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Dari tabel 4.13 tersebut dapat dijelaskan model persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + e$$

$$Y = 0,490 + 0,426 X_1 + 0,654 X_2 + 0,467 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas APBDes

a : Konstanta

b<sub>1</sub> : Koefisien partisipasi masyarakat

b<sub>2</sub> : Koefisien transparansi

b<sub>3</sub> : Koefisien akuntabilitas publik

X<sub>1</sub> : Partisipasi Masyarakat

X<sub>2</sub> : Transparansi

X<sub>3</sub> : Akuntabilitas Publik

E : Faktor error

<sup>9</sup> Riyanto and Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*.

Dapat dijelaskan dibawah ini yaitu :

- a. Nilai a = 0,490 yakni jika variabel bebas dianggap konstanta maka rata-rata kualitas APBDesa sebesar 0,490.
- b. Nilai koefisiensi regresi sebesar 0,426 yakni setiap terjadi kenaikan partisipasi masyarakat (X1) sebesar satuan, maka dapat terjadi peningkatan kualitas APBDesa sebesar 0,426.
- c. Nilai koefisiensi regresi sebesar 0,654 yakni setiap terjadi kenaikan transparansi (X2) sebesar satuan, maka dapat terjadi peningkatan kualitas APBDesa sebesar 0,654.
- d. Nilai koefisiensi regresi sebesar 0,537 yakni setiap terjadi kenaikan akuntabilitas publik (X3) sebesar satuan, maka dapat terjadi peningkatan kualitas APBDesa sebesar 0,467.

2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (*dependent*) dengan nilai antara nol sampai satu.<sup>10</sup> Hasil analisis uji koefisien determinasi bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784	.614	.594	1.62222

- a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Pada tabel 4.14 diatas besarnya koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik memiliki kontribusi 59,40% terhadap kualitas APBDesa di Kabupaten Kudus. Sedangkan sisanya 40,60% kemungkinan dlpengaruhi oleh variabel lain yang tidak dlteliti dalam penelltian ini.

3. Uji Statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan sehingga nilai dari koefisien regresi tersebut dapat diketahui secara bersama<sup>11</sup>. Apabila H<sub>0</sub> diterima jika :  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau Sig. > 0,05 dan sebaliknya H<sub>1</sub> diterima jika :

<sup>10</sup> Riyanto and Hatmawan.

<sup>11</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*.

$F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $Sig. \leq 0,05$ . Pada tabel distribusi F diketahui  $df(n1)=k$  dan  $df(n2)=n-k-1$ . Sehingga t tabel diperoleh  $df(n1)=3$  dan  $df(n2)=60-3-1$  dengan signifikansi 5% adalah 2,77.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji F**  
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	234.814	3	78.271	29.743	.000
Residual	147.369	56	2.632		
Total	382.183	59			

a. Dependent Variable: Kualitas APBDesa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi.

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.15 diperoleh data nilai  $F_{hitung}$  29.743 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $29.743 > 2,77$ ) maka  $H_0$  ditolak, maka partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yakni kualitas APBDesa.

#### 4. Uji Statistik T

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat) secara parsial<sup>12</sup>. Ketentuan dalam pengujian ini yaitu jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $\alpha < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai  $\alpha > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Diketahui tabel distribusi t dengan menggunakan derajat kebebasan  $df=(n-k)$ , maka  $df=(60-3)$  atau dengan derajat kebebasan 57 dengan signifikansi 0,05. Jadi t tabel sebesar 1,672. Berikut merupakan hasil uji  $t_{hitung}$  bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

<sup>12</sup> Budi darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji f, R2*.



**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
( Constant)	.490	2.817		.174	.863
Partisipasi Masyarakat	.426	.172	.288	2.472	.016
Transparansi	.654	.240	.349	2.723	.009
Akuntabilitas Publik	.467	.217	.254	2.158	.035

a. Dependent Variabel: Kualitas APBDesa

Sumber : Hasil Olah data dengan SPSS Statistics 25, 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.16 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBDesa

Ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  2,472 dengan signifikansi sebesar 0,016 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,472 >  $t_{tabel}$  (df=57) sebesar 1,672 dan tingkat signifikansinya  $0,016 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jadi bisa disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

b. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas APBDes

Ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  2,723 dengan signifikansi sebesar 0,009 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,723 >  $t_{tabel}$  (df=57) sebesar 1,672 dan tingkat signifikansinya  $0,009 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima jadi bisa disimpulkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

c. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas APBDes

Ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  2,158 dengan signifikansi sebesar 0,035 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,158 >  $t_{tabel}$  (df=57) sebesar 1,672 dan tingkat signifikansinya  $0,035 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima jadi bisa disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

## F. Pembahasan

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas APBDesa

Hasil pengujian hipotesis pertama ialah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBDesa menunjukkan

hasil nilai  $t_{hitung}$  2,472 dengan signifikansi sebesar 0,016 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,472 >  $t_{tabel}$  1,672 dan tingkat signifikansinya 0,016 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Rizal Andreeyan yaitu keikutsertaan warga pada proses mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan alternatif solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan upaya untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di daerah.<sup>13</sup> Berdasarkan teori partisipasi, partisipasi masyarakat merupakan adanya keterlibatan masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan dan pembangunan desa untuk mengevaluasi perubahan yang akan terjadi, agar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan bukti empiris yang sudah dilakukan dalam penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas APBDesa, maka penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Samel W Ririhena dan Fitriani<sup>14</sup>, Bestari Dwi Handayani<sup>15</sup>, Jurica Lucyanda dan Maylia Pramono Sari<sup>16</sup> yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas APBDesa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati<sup>17</sup>, Citra Indah Merina, Verawaty, dan Afriza Yolantri<sup>18</sup> menyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Andreeyan, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda."

<sup>14</sup> Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

<sup>15</sup> Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang."

<sup>16</sup> Lucyanda and Sari, "Reformasi Penyusunan Anggaran Dan Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)."

<sup>17</sup> Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

<sup>18</sup> Merina, Verawaty, and Yolantri, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan."

partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas APBDesa.

## 2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas APBDesa

Hasil pengujian hipotesis kedua ialah pengaruh transparansi terhadap kualitas APBDesa menunjukkan hasil nilai  $t_{hitung}$  2,723 dengan signifikansi sebesar 0,009 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,723 >  $t_{tabel}$  1,672 dan tingkat signifikansinya  $0,009 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

Mardiasmo dalam bukunya Indrawati Yuhertiana Dkk juga berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.<sup>19</sup> Berdasarkan teori *good governance*, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa dan pengelolaan sumber daya publiknya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan bukti empiris yang sudah dilakukan dalam penelitian bahwa transparansi berpengaruh terhadap kualitas APBDesa, maka penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati<sup>20</sup>, Samel W Ririhena dan Fitriani<sup>21</sup>, Bestari Dwi Handayani<sup>22</sup> yang menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas APBDesa. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>19</sup> Indrawati Yuhertiana, Lukman Arief, and Fajar Syaiful Akbar, INOVASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PUBLIC WELFARE (Sidoarjo: Zirafatma Jawara, 2020), 78-79.

<sup>20</sup> Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

<sup>21</sup> Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

<sup>22</sup> Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang."

dilakukan Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah<sup>23</sup>, Desy Dwi Permatasari dan Kartika<sup>24</sup> menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas APBDesa.

### 3. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas APBDesa

Hasil pengujian hipotesis ketiga ialah pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas APBDesa menunjukkan hasil nilai  $t_{hitung}$  2,158 dengan signifikansi sebesar 0,035 karena besarnya  $t_{hitung}$  2,158 >  $t_{tabel}$  1,672 dan tingkat signifikansinya  $0,035 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

Mardiasmo dalam bukunya Erika Revida et al, menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah, yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.<sup>25</sup> Berdasarkan teori *good governance*, akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dikarenakan pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa, agar disampaikan kepada publik secara terbuka dalam waktu tertentu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan bukti empiris yang sudah dilakukan dalam penelitian bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas APBDesa, maka penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Samel W Ririhena dan Fitriani<sup>26</sup>, Bestari Dwi

---

<sup>23</sup> Harahap and Syardiansah, “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.”

<sup>24</sup> Permatasari and Kartika, “Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019).”

<sup>25</sup> Erika Revida et al., MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 11.

<sup>26</sup> Ririhena and Fitriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke.”

Handayani<sup>27</sup>, dan Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, dan Pahala<sup>28</sup> yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas APBDesa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Desy Dwi Permatasari dan Kartika<sup>29</sup>, dan Ayu juliastuti<sup>30</sup> yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kualitas APBDesa.

#### 4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas APBDesa

Hasil pengujian hipotesis keempat ialah pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik terhadap kualitas APBDesa menunjukkan hasil nilai Fhitung 29.743 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Karena Fhitung  $> F_{tabel}$  ( $29,743 > 2,77$ ) maka  $H_0$  ditolak, maka partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kualitas APBDesa. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas APBDesa.

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pengambilan sebuah keputusan dalam perencanaan dan pembangunan desa guna mengevaluasi perubahan yang akan terjadi, agar berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan desa dan pengelolaan sumber daya publiknya merupakan bentuk transparansi pemerintah desa. Akuntabilitas publik yakni bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dikarenakan pemerintah desa memegang tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa, agar disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dalam

---

<sup>27</sup> Handayani, "Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD Kota Semarang."

<sup>28</sup> Muljo, Kurniawati, and Pahala, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran."

<sup>29</sup> Permatasari and Kartika, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)."

<sup>30</sup> Ayu Juliastuti, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah."

waktu tertentu. Untuk mencapai APBDesa yang berkualitas maka dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan bukti empiris yang sudah dilakukan dalam penelitian bahwa partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas APBDesa, maka penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan Samel W Ririhena dan Fitriani menjelaskan secara simultan atas partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).<sup>31</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan Penelitian Dince Lestari dan Andewi Rakhmawati menjelaskan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa<sup>32</sup>, Penelitian Ainul Yusna Harahap dan Syardiansah menjelaskan transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa<sup>33</sup>, Penelitian Desy Dwi Permatasari dan Kartika menjelaskan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Ririhena and Fitriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke."

<sup>32</sup> Lestari and Rakhmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan APBD Dan Dampaknya Terhadap Kualitas APBD (Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)."

<sup>33</sup> Harahap and Syardiansah, "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."

<sup>34</sup> Permatasari and Kartika, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kota Dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)."